



INDIKATOR *KINERJA UTAMA*

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2026 - 2030



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi terhadap manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Dikeluarkan Inspektorat Daerah	Sekretariat
	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan, tidak termasuk tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Batas maksimalnya ditetapkan 30% dari total belanja daerah dalam APBD atau perubahannya.	$= \frac{\text{Anggaran belanja Pegawai - Tunjangan Guru}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$	Bidang Anggaran
		2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Belanja ini mencakup infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas pelayanan publik, berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan layanan antar daerah	$= \frac{\text{Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$	Bidang Anggaran
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar mengacu pada tingkat pencapaian aktual pengeluaran APBD untuk bidang wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi dasar dibandingkan dengan pagu anggaran yang direncanakan	$= \frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$	Bidang Perbendaharaan
		2. Persentase Penurunan SILPA	Rasio perubahan negatif (penurunan) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun berjalan terhadap nilai SILPA tahun anggaran sebelumnya, dihitung dalam persentase untuk mengukur efisiensi pengelolaan APBD.	$= \frac{\text{Silpa Tahun berjalan}}{\text{Silpa Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Bidang Perbendaharaan
	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah merupakan penilaian profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Surat pernyataan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
		2. Persentase Laporan keuangan tepat waktu	Rasio jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dokumen laporan keuangan daerah yang disusun dan disampaikan sesuai batas waktu peraturan terhadap total OPD/dokumen yang wajib melaporkan, dihitung dalam persen.	$= \frac{\text{Jumlah OPD menyampaikan LKPD Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah OPD}} \times 100$	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	1. Persentase penambahan nilai aset tetap	Pertumbuhan nilai aset tetap daerah (seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan) dari tahun sebelumnya terhadap nilai akhir tahun sebelumnya, dihitung dalam persentase berdasarkan data neraca pemerintah daerah.	$= \frac{\text{Kenaikan / Penambahan Aset Tahun Berjalan}}{\text{Aset Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Bidang Aset

Bengkalis, Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis,



H. Aready

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 200212 1 004